

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN, DESENTRALISASI FISKAL, EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 – 2018

Taufik Hidayat B Tahawa<sup>1</sup>, Nurhidayah<sup>2</sup>, Erwin<sup>3</sup>, Riady Ibnu Khaldun<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

<sup>4</sup>Program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

\*e-mail: [taufikhidayat@unsulbar.ac.id](mailto:taufikhidayat@unsulbar.ac.id)

\*\*e-mail: [nurhidayah@unsulbar.ac.id](mailto:nurhidayah@unsulbar.ac.id)

\*\*\*e-mail: [erwin@unsulbar.ac.id](mailto:erwin@unsulbar.ac.id)

\*\*\*\*e-mail: [riadyibnu@unsulbar.ac.id](mailto:riadyibnu@unsulbar.ac.id)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the financial performance, financial capability, effectiveness and efficiency of the Majene Regency government in 2013-2018, measured from the analysis of income variance, analysis of the degree of fiscal decentralization, analysis of the level of regional independence, analysis of variance of expenditure, analysis of effectiveness of local original income and analysis of regional financial efficiency. This type of research is quantitative using secondary data and analyzed using financial ratios. The results of this study indicate that from 2013 to 2018 the analysis of income variants has largely met the criteria where the income rally is greater than budgeted, the analysis of the degree of fiscal decentralization is below 10 percent, indicating that it is still lacking, analysis of the level of regional independence is still very low with a percentage below the 25 percent criterion, the analysis of the expenditure variance has largely met the criteria where the expenditure rally is greater than budgeted, an analysis of the effectiveness of local revenue still shows 2 periods of ineffective results, however, the effectiveness of revenue in Majene Regency has quite effective and the analysis of the regional financial efficiency of the majority of the period is still below the efficient criteria with the percentage still exceeding 90 percent.*

**Keywords:** Financial performance, fiscal decentralization, effectiveness, efficiency of regional finances

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kinerja keuangan, kemampuan keuangan, efektivitas dan efisiensi pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2013 -2018, diukur dari analisis varian pendapatan, analisis derajat desentralisasi fiskal, analisis tingkat kemandirian daerah, analisis varian belanja, analisis efektifitas pendapatan asli daerah dan analisis efisiensi keuangan daerah. Jenis penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder serta di analisis menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 analisis varian pendapatan sebagian besar telah memenuhi kriteria dimana reliasi pendapatan lebih besar dari yang di anggarkan, analisis derajat desentralisasi fiskal berada di bawah 10 persen yang menandakan masih sangat kurang, analisis tingkat kemandirian daerah pula masih sangat rendah dengan persentase di bawah kriteria 25 persen, analisis varian belanja sebagian besar telah memenuhi kriteria dimana reliasi belanja lebih besar dari yang di anggarkan, analisis efektifitas pendapatan asli daerah masih menunjukkan 2 priode hasil yang kurang efektif, namun, efektifitas penerimaan pada Kabupaten Majene sudah cukup efektif dan analisis efisiensi keuangan daerah mayoritas priode masih dibawah kriteria efisien dengan persentasi masih melebihi 90 persen.

**Kata kunci:** Kinerja keuangan, desentralisasi fiskal, efektifitas, efisiensi keuangan daerah

## Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berbagai upaya telah dilakukan sampai tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2015-2019 untuk mempercepat pencapaian sasaran pokok yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan nasional. salah satu agenda prioritas pembangunan untuk perencanaan jangka menengah tersebut yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Untuk mewujudkan program tersebut maka di diperlukan adanya penguatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, merata, adil, berkesinambungan. Otonomi dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrisasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (Sijabat, 2014). Pencapaian rencana pemerintah pusat tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut (Albasiah, 2012) Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan yang bersumber pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal) dan Aspek kedua yaitu manajemen pengeluaran daerah, yang dimana pengelolaan keuangan daerah harus disajikan secara akuntabel dan transparan serta menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Suatu Daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah harus menegakkan akuntabilitas dan keadilan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Wahyudi, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan. Oleh sebab itu laporan keuangan harus disajikan secara sederhana dan mendetail agar mudah dipahami oleh para pengguna informasi. untuk mempermudah memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Menurut (Halim & Kusufi, 2007) dalam (Machmud, 2014) Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan

Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan antara lain adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan yaitu suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Wahyudi, 2018). Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan masih banyak lagi.

Analisa laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam suatu priode. Kinerja keuangan juga dapat dikatakan sebagai alat ukur pelaksanaan kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2008) dalam analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Capaian utama sasaran penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia secara nasional dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, dan kinerja aparatur pemerintah daerah.

**Tabel 1 Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia Tahun 2015 – 2018**

Uraaian	Satuan	2014 (Base Line)	2015	2016	2017	2018*
Realisasi Belanja Pegawai Provinsi	Persen	17,62	16,11	16,52	33,03	29,58
Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten/Kota	Persen	47,27	42,27	39,97	49,36	44,38
Realisasi Belanja Modal Provinsi	Persen	18,28	19,94	19,35	8,50	7,93
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota	Persen	25,09	25,20	25,05	11,62	7,74

Keterangan: \* Angka Realisasi Semester I Tahun 2018

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di Hut ke 74 Republik Indonesia (Bappenas)

Berdasarkan Tabel diatas, capaian kinerja keuangan daerah dari kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Kualitas belanja APBD di Indonesia dapat dilihat melalui indikator rata-rata persentase belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) dan belanja modal provinsi dan kabupaten/kota terhadap total belanja APBD. Tabel diatas menunjukkan realisasi persentase belanja pegawai provinsi dan kabupaten/kota pada semester I tahun 2018 masing-masing sebesar 29,58 persen dan 44,38 persen. Kondisi tersebut masih memerlukan kerja keras untuk menurunkan rata-rata persentase belanja pegawai tersebut menjadi 13 persen untuk provinsi dan 35 persen untuk kabupaten/kota sesuai target tahun 2019. Sementara itu capaian realisasi belanja modal provinsi dan kabupaten/kota pada semester I tahun 2018, yaitu masing-masing sebesar 7,93 persen dan 7,74 persen, masih perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai target sebesar 30 persen di tahun 2019. Kondisi seperti ini merupakan fenomena yang dapat menggambarkan bagaimana pencapaian kinerja keuangan di Indonesia yang masih belum optimal pencapaiannya. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan tersebut, otonomi daerah harus terselenggara secara menyeluruh di Provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Hanik & Karyanti, 2014).

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Majene yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Majene menjadi “Majene Profesional, Produktif & Proaktif 2021” perlu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah (Ramadani, 2017). Berikut ini disajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Majene sejak tahun 2013 sampai dengan 2018:

**Tabel 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Majene Tahun 2013 – 2018**

Tahun	Majene		Selisih Pendapatan dan Belanja (Surplus/Defisit)
	Pendapatan	Belanja	
2013	596,607,458,712.56	588,161,221,865.00	8,446,236,847.56
2014	672,757,348,789.68	668,398,232,931.00	4,359,115,858.68
2015	782,530,360,623.56	782,708,572,912.00	(178,212,288.44)
2016	800,530,284,780.00	800,659,899,520.00	(129,614,740.00)
2017	918,545,076,665.88	888,136,212,304.00	30,408,864,361.88
2018	819,289,952,613.72	887,677,794,370.00	(68,387,841,756.28)

Sumber: Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Kemenkeu)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu meningkat dan tahun 2018 pendapatan menurun sebesar Rp. 99,255,124,052.16. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Apabila dilihat dari selisih antara total pendapatan dan belanja kabupaten majene tahun 2015, 2016 dan tahun 2018 mengalami defisit anggaran. Sedangkan tahun 2013, 2014 dan 2017 mengalami surplus. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Hal ini berarti anggaran pendapatan nilainya lebih kecil dari anggaran belanja (Prihatiningsih & HM, 2013). Kondisi realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Majene dalam masih dianggap belum stabil apalagi melihat total

defisit tahun 2018 cukup tinggi yang mencapai 68,387,841,756.28. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam menggunakan analisis keuangan untuk mengetahui apa penyebab permasalahan tersebut bisa terjadi.

### **Kajian Teoritis**

Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang – undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Poyoh et al., 2017). Otonomi Daerah menurut Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Pekei, 2016).

Keuangan Daerah yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan (Halim & Kusufi, 2012). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini megandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut dengan pengurusan bendaharawan (Ramadani, 2017). Keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Poyoh et al., 2017).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Poyoh et al., 2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBD, yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Secara umum kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Mahsun et al., 2011).

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan terbaik yang hal itu seringkali sulit diukur dengan ukuran finansial. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat (Ramadani, 2017). Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sector public ialah dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis metode penelitian dimana data yang diperoleh dari sampel dan populasi digunakan penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang kemudian diinterpretasikan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang merupakan objek dari penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang terdiri dari laporan keuangan daerah. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan tertulis yang ada pada website Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Penelitian ini dilakukan terhadap data-data keuangan Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2013-2018 khususnya data yang ingin diteliti yaitu anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Majene. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis rasio keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Analisis Varians Penapatan

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

Analisis Varians Penapatan = Realisasi – Anggaran Penapatan

Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians) anggaran Pendapatan. Analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi Pendapatan. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavorable*) (Mahmudi, 2016).

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Penapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

**Tabel 3 Tingkat Kemampuan Keuangan**

Tingkat Kemampuan Keuangan	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
Lebih dari 50	Sangat Baik

Sumber : (Rofingatun & Kreuta, 2017)

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Bantuan Pusat, Provinsi Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian ini akan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Berikut Tabel Pola hubungan dan tingkat Rasio Kemandirian.

**Tabel 4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25 %	Instruktif
Rendah	25 – 50 %	Konsultatif
Sedang	50 – 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 – 100 %	Delegatif

Sumber: (Ulum, 2012)

4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahsuni et al., 2011):

$$\text{Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

Sangat efektif : > 100%

Efektif : 100%

Cukup Efektif : 90% - 99%

Kurang Efektif: 75% - 89%



Tidak Efektif : < 75%

5. Analisis Varians Belanja

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):  
 Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Penilaian kinerja anggaran Belanja pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians) anggaran. Analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi Belanja. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavorable*) (Mahmudi, 2016).

6. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):  
 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah =  $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kriteria Rasio Efisiensi ialah sebagai berikut:

**Tabel 5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
100 % Keatas	Tidak Efisien
90 – 100 %	Kurang Efisien
80 – 90 %	Cukup Efisien
60 – 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber : (Mahsun et al., 2011)

**Hasil Penelitian**

Hasil perhitungan an kajian analisis rasio keuangan Kabupaten Majene tahun 2013 – 2018, direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria yang terdapat di literatur. Berikut kajiannya:

**Analisis Varians Pendapatan**

Realisasi anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan untuk diperoleh oleh suatu pemerintah daerah. Analisis varians pendapatan dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan jumlah yang dianggarkan. Selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan oleh pemerintah daerah. Suatu Pemerintah Daerah dapat dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*Favorable Variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable Variance*). Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun 2013 – Tahun 2018:

**Tabel 6 Analisis Varians Pendapatan**

Tahun	Realisasi Pedapatan	Anggaran Pendapatan	Analisis Varian Pendapatan	Kriteria
2013	596,607,458,712.56	579,419,293,745.00	17,188,164,967.56	<i>favourable</i>
2014	672,757,348,789.68	647,514,142,774.00	25,243,206,015.68	<i>favourable</i>
2015	782,530,360,623.56	758,316,184,321.00	24,214,176,302.56	<i>favourable</i>
2016	800,530,284,780.00	868,165,324,265.00	(67,635,039,485.00)	<i>unfavorable</i>
2017	918,545,076,665.88	865,690,214,790.00	52,854,861,875.88	<i>favourable</i>
2018	819,289,952,613.72	871,847,775,174.00	(52,557,822,560.28)	<i>unfavorable</i>

Sumber : *Data Sekuner Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara terperinci pergerakan realisasi, anggaran dan analisis varian pendapatan Kabupaten Majene tahun anggaran 2013-2018. Apabila dari segi varians pendapatan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi lebih besar dari jumlah pendapatan yang dianggarkan, ini menunjukkan pendapatan pada Pemkab Majene yang telah efektif atau



dengan kriteria *favourable*. Tabel diatas pula menunjukkan pergerakan realisasi, anggaran dan analisis varian pendapatan Kabupaten Majene tahun anggaran tahun 2016 dan 2018 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi lebih kecil dari jumlah pendapatan yang dianggarkan, ini menunjukkan pendapatan pada Pemkab Majene yang belum efektif atau dengan kriteria *unfavorable*. Pemerintah Daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik (Ramadani, 2017). Berdasarkan hasil diatas maka Analisis varians secara umum di kabupaten majene untuk 6 tahun terakhir telah menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dikatakan baik.

#### **Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Capaian hasil perhitungan Derajat Desentralisasi fiskal direkapitulasikan dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan kriteria dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2013	21,901,551,954.15	596,607,458,712.56	3.67	Sangat Kurang
2014	53,921,491,920.68	672,757,348,789.68	8.01	Sangat Kurang
2015	45,231,988,393.56	782,530,360,623.56	5.78	Sangat Kurang
2016	50,615,846,997.00	800,530,284,780.00	6.32	Sangat Kurang
2017	83,238,112,411.80	918,545,076,665.88	9.06	Sangat Kurang
2018	89,315,943,000.47	819,289,952,613.72	10.90	Kurang

Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keungan Kemenkeu)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tahun untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan kriteria skala kemampuan daerah penilaian pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dikatakan sangat kurang, namun pada tahun 2018 penilaian meningkat menjadi kurang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten majene dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki masih sangat kurang dan semakin menurun tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan desentralisasi. Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Kemampuan pendapatan asli daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kemampuan keuangan kabupaten majene yang masih dalam kondisi kurang dari proses desentralisasi. Hal ini menimbulkan diskorsi daerah dalam bidang anggaran, sehingga kecenderungan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada masyarakat. Pendelegasian sebagian urusan kepada daerah atau desentralisasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bernegara. Tujuan dari pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat dan menciptakan demokratisasi politik dalam keputusan public (Rofingatun & Kreuta, 2017).

Derajat desentralisasi diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam hal kemandirian dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi (Sugeha et al., 2015). Perbaikan pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik akan sangat membantu dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Majene dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pusat ataupun provinsi. Perlu diingat kabupaten Majene merupakan kota pendidikan dimana dengan adanya status ini kedepannya pengelolaan pendapatan asli daerah bisa lebih efektif sehingga dapat meningkatkan derajat desentralisasi 5 tahun kedepan.

#### **Analisis Rasio Kemandirian Daerah**

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian untuk Pemerintah Kabupaten Majene untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2018 berdasarkan data keungan yang diambil

**Tabel 8 Rasio Kemandirian Daerah**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2013	21,901,551,954.15	571,059,414,758.41	3.84	Instruktif
2014	53,921,491,920.68	613,773,112,669.00	8.79	Instruktif
2015	45,231,988,393.56	713,333,734,230.00	6.34	Instruktif
2016	50,615,846,997.00	706,249,351,238.87	7.17	Instruktif
2017	83,238,112,411.80	762,600,541,952.08	10.92	Instruktif
2018	89,315,943,000.00	756,462,831,124.00	11.81	Instruktif

Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Majene menunjukkan persentase yang belum stabil dan cenderung rendah karena data yang ada menunjukkan masih berada pada tingkat instruktif atau rendah sekali yang berada di bawah persentase 25 persen. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor penerimaan pendapatan daerah yang beragam di setiap tahunnya, permintaan transfer yang beragam setiap tahunnya, kebutuhan yang berdeda setiap tahunnya dan pendapatan asli daerah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Majene tahun 2013 sampai tahun 2018 cenderung meningkat dari 3.84 % pada tahun 2013 menjadi 11.81 persen tahun 2018. Hal ini mengindikasikan peningkatan yang stabil walaupun masih berada pada kriteria instruktif .

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Ulum, 2012).

**Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Berikut hasil perhitungan rasio efektifitas PAD untuk Pemerintah Kabupaten Majene untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh:

**Tabel 9 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas PAD	Kriteria
2013	21,901,551,954.15	18,288,534,646.00	119.76	Sangat efektif
2014	53,921,491,920.68	31,177,899,820.00	172.95	Sangat efektif
2015	45,231,988,393.56	53,007,303,955.00	85.33	Kurang Efektif
2016	50,615,846,997.00	58,790,168,899.00	86.10	Kurang Efektif
2017	83,238,112,411.80	62,726,695,759.00	132.70	Sangat efektif
2018	89,315,943,000.00	88,456,635,277.00	100.97	Sangat efektif

Sumber : *Data Sekunder Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kabupaten Majene menunjukkan persentase yang belum stabil karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun dan berfluktuasi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor realisasi setiap elemen PAD yang beragam di setiap tahunnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas PAD Kabupaten Majene dari Tahun 2013, 2014, 2017 dan 2018 sudah menunjukkan kriteria efektif dengan persentase diatas 100 persen. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 rasio efektifitas PAD berada pada kriteria kurang efektif. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan sudah menggambarkan efektifitas penggunaan PAD. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil di suatu daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektifitas PAD menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran.



### Analisis Varians Belanja

Analisis varians anggaran belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Perhitungan berikut menunjukkan varians anggaran belanja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 10 Analisis Varians Belanja**

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Analisis Varians Belanja	Kriteria
2013	588,161,221,865.00	579,219,048,351.00	8,942,173,514.00	<i>favourable</i>
2014	668,398,232,931.00	647,265,008,897.00	21,133,224,034.00	<i>favourable</i>
2015	782,708,572,912.00	759,556,139,879.00	23,152,433,033.00	<i>favourable</i>
2016	800,659,899,520.00	868,365,324,266.00	(67,705,424,746.00)	<i>unfavourable</i>
2017	888,136,212,304.00	864,390,214,790.00	23,745,997,514.00	<i>favourable</i>
2018	887,677,794,370.00	870,547,775,174.00	17,130,019,196.00	<i>favourable</i>

Sumber : Data Sekuner Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)

Analisis varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Majene tahun 2013, 2014, 2015, 2017 dan 2018 lebih lebih besar dari jumlah yang dianggarkan dengan kriteria *favourable* . Sedangkan tahun 2016 realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja dengan kriteria *unfavourable*. Jadi dapat disimpulkan analisis varian belanja Kabupaten Majene tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mayoritas *favourable* sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan dalam teori.

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran Belanja. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu selisih lebih dan selisih kurang. Selisih lebih terjadi saat realisasi belanja lebih besar dari anggaran, sedangkan selisih kurang terjadi karena realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan. Selisih signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran belanja selama rentan tahun 2013 sampai tahun 2018. Kedua dapat diartikan selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat dan akurat.

### Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Berikut hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah untuk Pemerintah Kabupaten Majene untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh:

**Tabel 11 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
2013	588,161,221,865.00	596,607,458,712.56	98.58	Kurang Efisien
2014	668,398,232,931.00	672,757,348,789.68	99.35	Kurang Efisien
2015	782,708,572,912.00	782,530,360,623.56	100.02	Tidak Efisien
2016	800,659,899,520.00	800,530,284,780.00	100.02	Tidak Efisien
2017	888,136,212,304.00	918,545,076,665.88	96.69	Kurang Efisien
2018	887,677,794,370.00	819,289,952,613.72	108.35	Tidak Efisien

Sumber : Data Sekuner Diolah, 2020 (Portal Data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)

Pada Tabel diatas menjelaskan hasil perhitungan Rasio Efisiensi keuangan untuk tahun 2013 sampai tahun 2018. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Majene selama tahun anggaran 2013, 2014 dan 2017 hasilnya kurang efisien, sedangkan tahun 2015, 2016 dan 2018 hasilnya dengan kriteria tidak efiseien. Hal ini disebabkan minimnya penerimaan daerah jika dibandingkan dengan pengeluaran, alokasi belanja yang tidak terencana secara baik dan pengelolaan sumber sumber pendapatan yang belum efektif selama tahun 2013 sampai tahun 2018. Hasil diatas juga menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Majene tahun 2013 sampai 2018 belum berjalan dengan baik atau sangat kurang efisien. Efisiensi dapat dikatakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya. Efisiensi dapat dikatakan sebagai hasil pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. (Rondonuwu et al., 2016).

Suatu Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien harus dilakukan secara optimal, karena hal ini akan berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah. Apabila pengelolaan keuangannya sudah efisien ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien maka perlu untuk didorong agar pengelolaannya akan lebih membaik dan akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan di suatu daerah, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis keuangan diatas secara garis besar terdapat 3 analisis yang hasilnya masih sangat rendah dan perlu dilakukan perbaikan serta evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Pertama ialah derajat desentralisasi fiskal yang hasilnya sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 masih berada di bawah 10 persen atau berkriteria kurang. Desentralisasi fiskal merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan hubungan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran dana publik antara tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang dibawahnya. Rendahnya tingkat desentralisasi fiskal secara tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah akan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah.

Hasil diatas menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Majene tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2013 sampai tahun 2018 tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Majene masih berada dibawah 25 persen. Hal ini menandakan bahwa masih tingginya ketergantungan dengan bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Dan masih belum efisiennya Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2018. Hasil analisis diatas menunjukkan selama tahun 2013 sampai tahun 2018. Hal ini disebabkan minimnya penerimaan daerah jika dibandingkan dengan pengeluaran, alokasi belanja yang tidak terencana secara baik dan pengelolaan sumber sumber pendapatan yang belum efektif selama tahun 2013 sampai tahun 2018. Oleh karena itu untuk 5 tahun kedepannya diperlukan program yang dapat meningkatkan *economic development* secara cepat agar pencapaian visi, misi, tujuan dan harapan Kabupaten Majene dapat tercapai.

*Economic development* diartikan sebagai suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di bidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Demora, 2016). Dalam konteks daerah, pembangunan ekonomi merupakan hal yang menjadi perhatian lebih karena mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik melalui proses pengelolaan sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola agar daerah tersebut tidak hanya menggantungkan ekonominya pada pinjaman, dana transferpusat dan bantuan lainnya. Oleh karena itu di terbitkanlah Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan (Poyoh et al., 2017).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah (Peki, 2016). Artinya, suatu daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali semua sumber-sumber keuangannya secara sendiri dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat sebaiknya harus seminimal mungkin, maka Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing. Pembentukan pendapatan asli daerah dari kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kusuma, 2016). Pendapatan asli daerah dapat berupa sumber daya alam ataupun bentuk aktifitas lain seperti jasa. Namun peran pemerintah pada masa desentralisasi akan menjadi penting karena pengaruh dari desentralisasi sangat tergantung pada institusi fiskal dan system politik yang ada di Negara tersebut .

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Varians Pendapatan yang dilakukan dari segi pendapatan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang terealisasi lebih besar dari jumlah pendapatan yang dianggarkan, ini menunjukkan pendapatan pada Pemkab Majene yang telah efektif atau dengan kriteria *favourable*. Sedangkan tahun anggaran tahun 2016 dan 2018 menunjukkan jumlah pendapatan yang terealisasi lebih kecil dari jumlah pendapatan yang dianggarkan, ini menunjukkan pendapatan pada Pemkab Majene yang belum efektif atau dengan kriteria *unfavourable*.
2. Rasio Derajat Desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tahun untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung menunjukan hasil yang kurang maksimal dimana masih berada di bawah 10 persen. Berdasarkan kriteria skala kemampuan daerah penilaian pada tahun 2013 sampai tahun 20117 dapat dikatakan sangat kurang, namun pada tahun 2018 penilaian meningkat menjadi kurang.
3. Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Majene tahun 2013 sampai 2018 masih berada pada tingkat instruktif atau rendah yang berada di bawah kriteria 25 persen.
4. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan PAD tahun 2013- 2018. Terlihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkisar antara 85.00 % sampai 132.0 %. Angka capaian ini mengimplikasikan bahwa tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Majene sudah menunjukan kriteria efektif dengan persentase diatas 100 persen.
5. Analisis varians belanja berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Majene tahun 2013, 2014, 2015, 2017 dan 2018 lebih lebih besar dari jumlah yang dianggarkan dengan kriteria *favourable*. Sedangkan tahun 2016 realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja dengan kriteria *unfavourable*.
6. Rasio Efisiensi keuangan untuk tahun 2013 sampai tahun 2018 secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Majene selama tahun anggaran 2013, 2014 dan 2017 hasilnya kurang efisien, sedangkan tahun 2015, 2016 dan 2018 hasilnya dengan kriteria tidak efisien.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Majene, penulis mencoba mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut (1) Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 UU Nomor 32 tahun 2004, sangat diperlukan kemandirian keuangan, efektifitas dan efisiensi agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah. (2) Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (3) Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis beberapa komponen lain dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga akan lebih lengkap penyajian analisisnya.(4) Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh. (5) Penelitian ini hanya menggunakan data yang ada di *website* direktorat jendral perimbangan keuangan Kementrian Keuangan, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit agar tingkat keakuratan data lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

- Albasiah, O. A. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Demora, V. (2016). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13–20.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. (2014). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang).

- Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Perbankan Indonesia*, 22(2).
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 9(1), 1–11.
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. *BPFE: Yogyakarta*.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Penerbit Taushia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Prihatiningsih, A., & HM, S. H. M. S. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 97–108.
- Ramadani, R. F. (2017). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. *Ekonomia*, 5(3), 327–345.
- Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *KEUDA: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2(3).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sijabat, M. Y. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 236–242.
- Sugeha, F. F., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2015). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Accountability*, 4(1), 131–139.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulum, M. D. (2012). Audit Sektor Publik. In *Ja-karta: Bumi Aksara*Ja-karta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wahyudi, M. (2018). KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(2), 25–32.
- [www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd)